

MODEL-MODEL PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH/PERGURUAN TINGGI

Nurlaila

Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang

Jl. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 1, Km. 3,5 Palembang

abstract

Islamic religious education quality improvement is expected to resolve the multidimensional crisis in our country, especially the moral-ethical aspects, and also be able to contribute in elaborating the meaning of national education that serves to develop skills and build character and civilization of the nation's dignity in the context of the intellectual life of the nation that aims for the development of potential learners in order to become a man of faith, fear of God Almighty, noble, healthy, knowledgeable, capable, creative, independent, and become citizens of a democratic and responsible. Developing models of PAI in Schools / Colleges General include: Model dichotomous, Mechanism Model, Model Organism / Systemic, and the Integrative Education Model. Teraebut models needed to overhaul capabilities and political well from policy makers, especially the leaders of the institution itself.

Keywords: *Development Models, Islamic Religious Education, School/College*

A. Pendahuluan

Diskursus tentang pengembangan pendidikan agama Islam di Indonesia yang dipresentasikan oleh para ahli dan pemerhati pendidikan Islam baik melalui tulisan-tulisan mereka di berbagai buku, majalah, jurnal dan sebagainya, maupun melalui kegiatan seminar, penataran dan lokakarya,

serta kegiatan lainnya, telah memperkaya wawasan dan visi kita dalam mengembangkan Pendidikan Agama Islam di Indonesia. Berbagai pemikiran dan pengalaman mereka perlu dipotret, ditata dan didudukkan dalam suatu paradigma, sehingga model-model, Orientasi dan langkah-langkah yang hendak dituju menjadi semakin jelas. Lagi pula kalau seseorang hendak melakukan pengembangan dan penyempurnaan, maka kata kuncinya sudah dapat dipegang, sehingga tidak akan terjadi salah letak, arah dan langkah, yang pada gilirannya dapat menimbulkan sikap di *overacting* dalam menyikapi paradigma tertentu.

Sisi lain, selama ini terdapat beberapa kebijakan yang diambil dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan agama yang diharapkan mampu menyelesaikan krisis multidimensional di negara kita, terutama yang menyangkut aspek moral—etika, dan sekaligus hendak memberikan kontribusi dalam menjabarkan makna pendidikan nasional, yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membangun watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pasal 3).

Salah satu kebijakan yang ditetapkan adalah bahwa “kelompok mata pelajaran Agama dan Akhlak Mulia bertujuan membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, yang dicapai melalui *niatan atau kegiatan agama*,

kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga, dan kesehatan (Permendiknas No. 23 Tahun 2006). Demikian pula Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor:43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Di Perguruan Tinggi, bahwa visi kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) termasuk di dalamnya pendidikan agama di perguruan tinggi merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya. Kedua kebijakan tersebut bermaksud untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama. Namun demikian, dalam praktiknya di sekolah ataupun di perguruan tinggi masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Kenyataan tersebut menggarisbawahi bahwa di satu sisi beberapa keputusan dan kebijakan yang diambil kadang-kadang terkesan menggebu-gebu dan idealis, tetapi di sisi lain para pelaksana di lapangan kadang-kadang mengalami beberapa hambatan dan kesulitan untuk merealisasikannya atau bahkan intensitas pelaksanaan dan efektivitasnya masih dipertanyakan. Kajian ini dimaksudkan untuk memberikan deskripsi tentang pengembangan pendidikan agama Islam melalui potret atau pemetaan paradigma yang ada dan memperjelas orientasi dan wilayah dan masing-masing paradigma tersebut. Melalui pemahaman berbagai paradigma tersebut akan diketahui paradigma mana yang sekiranya relevan untuk diterapkan dan dikembangkan dalam merealisasikan kebijakan tersebut, terutama dalam menatap masa depan bangsa Indonesia menuju masyarakat madani.

A. Pendidikan Agama Islam di Sekolah

Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa pada awal perkembangan sains modern (sekitar abad 16/17 M) pernah terjadi perpecahan antara kaum agamawan dan ilmuan, yang ditandai dengan sikap keras kaum agamawan Eropa (penganut *geosentris*) kepada penganut heliosentris, seperti Copernicus, Bruno, Kepler, Galileo dan lain-lain. Metodologi yang dikembangkan oleh mereka mengandalkan kemampuan inderawi (*empiris*) sehingga kajian-kajian keagamaan yang bersifat non inderawi dianggap tidak ilmiah (Marwah Daud Ibrahim, 1994:37).

Di Indonesia, perpecahan antara ilmuan dan agamawan ternyata tak tercatat dalam sejarah perkembangan iptek, malahan himbauan agar ilmuan dan agamawan saling mendukung serta terdengar gemanya di Indonesia. Misalnya, Baiquni menyatakan bahwa iptek terus menerus memerlukan bantuan agama; dan Y.B. Mangunwijaya (1998) juga mengajak kita untuk menarik hikmah dri Galileo-Galilei. Munculnya ICMI juga merupakan kasus yang menarik untuk mengharmoniskan hubungan antara ilmuan dan agamawan. Oleh karena itu, pengalaman sejarah dan negara industri yang saling bertentangan itu akan sangat sulit ditemui di Indonesia, bilamana benar-benar tercipta keserasian antara ilmu pengetahuan dan agama.

Dalam arti keyakinan beragama, (sebagai hasil pendidikan agama diharapkan mampu memperkuat upaya penguasaan dan pengembangan iptek, dan sebaliknya, pengembangan iptek memperkuat keyakinan beragama. Ilmu pengetahuan berbicara *know what* dan *know why*, dan teknologi berbicara *know how*.

Temuan iptek telah menyebarkan basil yang membawa kemajuan, dan dampaknya jelas terasa bagi kehidupan seluruh umat manusia. Semua hasil temuan iptek di satu sisi harus diakui telah secara nyata mempengaruhi bahkan memperbaiki taraf dan mutu hidup manusia. Di sisi lain, produk temuan dan kemajuan iptek telah mempengaruhi bangunan kebudayaan dan gaya hidup manusia (Soetjipto Wirosardjono, 1992). Kenyataan seperti ini akan mempengaruhi nilai sikap atau tingkah laku kehidupan individu dan masyarakatnya. Hasil studi yang dilakukan oleh Inkeles dan Smith (1974:18-24) di enam negara sedang berkembang (Argentina, Bangladesh, Chili, India, Israel, dan Nigeria) serta pernyataan Naisibitt dan Aburdene (seperti dikutip oleh Jalaluddin Rakhmat, 1991:71) dalam Megatrends, sebagaimana dikemukakan terdahulu menunjukkan bahwa ada beberapa nilai, sikap dan tingkahlaku individu dan masyarakat modern yang kongruen (sejalan) dengan ajaran agama Islam dan mendukung keberhasilan pembangunan. Misalnya lemahnya keyakinan keagamaan, sikap individualitas, materialitis, hedonistis, dan sebagainya.

Karena itu, masalah yang perlu segera mendapatkan jawaban terutarna dan para GPAI adalah "mampukah kekuatan pendidikan agama (Islam) itu berdialog dan berinteraksi dengan perkembangan zaman modern yang ditandai dengan kemauan iptek dan informasi dan mampukah mengatasi dampak negatif dan kemajuan tersebut"? Di sisi lain, bangsa Indonesia juga mengalami krisis nasional baik di bidang ekonomi, politik, hukum, ataupun lainnya. Krisis itu ternyata sangat mengkhawatirkan bagi semua pihak dan PHK masyarakat. Meledaknya jumlah pengangguran sebagai akibat dari PHK dan terbatasnya lapangan kerja, demikian juga membengkaknya jumlah orang miskin, terjadi

born di mana-mana (bom Bali bom Marriot, bom Kuningan dan lain-lain), mewabahnya korupsi naiknya BBM dan kebutuhan pokok lainnya, merupakan persoalan krusial yang perlu segera ditangani serius.

Dalam kondisi semacam ini, masyarakat rupanya masih berharap besar sekaligus menunggu-nunggu jasa dan peran yang disumbangkan oleh agama, yang di dalamnya sarat akan dimensi moralitas dan spiritualitas, baik secara konseptual maupun aktualitasnya, dan/atau normativitas, maupun historisitasnya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang pluralistik, serba ganda dalam hal etnis, sosial, kultural, politik maupun agama. Agama bisa menjadi pendukung kedinamisan, dan sebaliknya agama akan menjadi penyebab pertikaian, konflik, dan perpecahan. Karena itu kerukunan umat beragama perlu senantiasa diciptakan guna mengantisipasi krisis nasional tersebut.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai persoalan itulah, maka pembelajaran pendidikan agama di sekolah harus menunjukkan kontribusinya. Hanya saja perlu disadari bahwa selama ini terdapat berbagai kritik terhadap pelaksanaan pendidikan agama yang sedang berlangsung di sekolah. Mochtar Buchori (1992) misalnya menilai kegagalan pendidikan agama disebabkan karena praktik pendidikannya hanya memperhatikan *aspek kognitif* semata dan pertumbuhan kesadaran nilai-nilai (agama, dan *mengabaikan pembinaan aspek efektif dan konatif-volutif* yakni kemauan dan tekad untuk mengamalkan nilai-nilai (agama). Akibatnya terjadi kesenjangan antara pengetahuan dan pengamalan, antara *gnosos* dan *praxis* dalam kehidupan nilai agama. Atau dalam praktik pendidikan agama merubah menjadi pengajaran

agama, sehingga tidak mampu membentuk pribadi-pribadi Islami.

Pernyataan senada dikemukakan oleh Harun Nasution (1995:428), bahwa pendidikan agama banyak dipengaruhi oleh *trend* Barat, yang lebih rnengutamakan pengajaran daripada pendidikan moral, padahal intisari dan pendidikan agama adalah pendidikan moral. Mochtar Buchori (1992) juga menyatakan bahwa kegiatan pendidikan agama berlangsung selama mi lebih banyak bersikap rnenyendiri kurang berinteraksi dengan kegiatan-kegiatan pendidikan lainnya. Cara kerja semacam ini kurang efektif untuk keperluan penanaman suatu perangkat nilai yang kompleks. Karena itu seharusnya para pendidik/guru agama bekerjasama dengan guru non agama dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Pernyata Senada juga telah dinyatakan oleh Soedjatmoko (1976) bahwa pendidikan agama harus berusaha berintegrasi dan bersinkronisasi dengan pendidikan non agama. Pendidikan agama tidak boleh dan tidak dapat berjalan sendiri, tetapi harus berjalan bersama dan bekerjasama dengan program-program pendidikan non agama kalau ia irigin rnempunyai relevansi terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Di samping itu, Rasdianah (1995:4-7) mengemukakan beberapa kelemahan lainnya dan pendidikan agama Islam di sekolah, baik dalam pemahaman materi pendidikan agama Islam maupun dalam pelaksanaannya, yaitu:

1. Dalam bidang teologi, ada kecendrungan mengarah pada paham fatalistik;
2. Bidang akhlak yang berorientasi pada urusan sopan santun dan belum dipahami sebagai keseluruhan pnhadi manusia beragama;

3. Bidang ibadah diajarkan sebagai kegiatan rutin agama dan kurang ditekankan sebagai proses pembentukan kepribadian;
4. Dalam bidang hukum (*fiqh*) cenderung dipelajari sebagai tata aturan yang tidak akan berubah sepanjang masa, dan kurang memahami dinamika dan jiwa hukum Islam;
5. Agama Islam cenderung diajarkan sebagai dogma dan kurang mengembangkan rasionalitas serta kecintaan akan kemajuan ilmu pengetahuan;
6. Orientasi mempelajari al-Qur'an masih cenderung pada kemampuan membaca teks, belum mengarah pada pemahaman arti dan penggalian makna.

Dan uraian di atas, dapat dipahami bahwa tantangan pendidikan agama Islam yang begitu kompleks pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua macam, yaitu tantangan *internal* dan tantangan *eksternal* dari pendidikan agama Islam. Tantangan *internal* ini menyangkut sisi Pendidikan Agama Islam yang kurang tepat, sempitnya pemahaman terhadap esensi pelajaran agama Islam, perancangan dan penyusunan materi yang kurang tepat, maupun metodologi dan evaluasinya, serta pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan agama Islam itu sendiri yang sebagainya masih bersikap eksklusif dan belum mampu berinteraksi dan bersinkronisasi dengan yang lainnya. Sedangkan tantangan *eksternal* berupa berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada munculnya *scientific criticism* terhadap penjelasan ajaran agama yang bersifat konservatif tradisional, tekstual, dan skripturalistik; era globalisasi di bidang informasi, serta perubahan sosial ekonomi dan budaya dengan segala dampaknya; dan kemajemukan masyarakat beragama yang masih belum siap untuk berbeda paham dan justeru cenderung

bersikap apologis, fanatik, absolutis, serta *truth claim* yang dibungkus dalam simpul-simpul *interest*, baik interes pribadi maupun yang bersifat politis ataupun sosiologis.

Berbagai macam tantangan pendidikan agama Islam tersebut sebenarnya dihadapi oleh semua pihak, baik keluarga, pemerintahan, maupun masyarakat, baik yang terkait langsung ataupun tidak langsung dengan kegiatan pendidikan agama Islam. Namun demikian, GPAI di sekolah yang terkait langsung dengan pelaksanaan pendidikan Islam dituntut untuk mampu menjawab dan mengantisipasi berbagai tantangan tersebut. Dan untuk mengantisipasinya diperlukan adanya profil GPAI di sekolah yang mampu menampilkan sosok kualitas personal, sosial, dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.

B. Model-model Pengembangan PAI di Sekolah/ Perguruan Tinggi Umum

Dalam realitas kehidupan sehari-hari sering timbul pertanyaan: apa saja aspek-aspek kehidupan itu? Apakah agama merupakan bagian dan aspek kehidupan, sehingga hidup beragama berarti menjalankan salah satu aspek dan berbagai aspek kehidupan, ataukah agama merupakan sumber nilai-nilai dan operasional kehidupan, sehingga agama akan mewarnai segala aspek kehidupan itu sendiri? Dalam konteks inilah para pemikir dan pengembang pendidikan pada umumnya mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut pada gilirannya melahirkan beberapa model dalam pengembangan pendidikan agama Islam sebagaimana uraian berikut.

1. Model Dikotomis

Pada model ini, aspek kehidupan dipandang dengan sangat sederhana, dan kata kuncinya adalah *dikotomi* atau *diskrit*. Segala sesuatu hanya dilihat dan dua sisi yang berlawanan, seperti laki-laki dan perempuan ada dan tidak ada, bulat dan tidak bulat, pendidikan agama dan pendidikan nonagama, demikian seterusnya. Pandangan dikotomis tersebut pada gilirannya dikembangkan dalam memandang aspek kehidupan di dunia dan akhirat, kehidupan jasmani dan rohani, sehingga pendidikan agama Islam hanya diletakkan pada aspek kehidupan akhirat saja atau kehidupan rohani saja. Seksi yang mengurus masalah keagamaan disebut sebagai seksi kerohanian. Dengan demikian, pendidikan agama dihadapkan dengan pendidikan non agama, pendidikan keislaman dengan nonkeislaman, demikian seterusnya.

Pandangan semacam itu akan berimplikasi pada pengembangan pendidikan agama Islam yang hanya berkisar pada aspek kehidupan ukhrowi yang terpisah dengan kehidupan duniawi, atau aspek kehidupan rohani yang terpisah dengan kehidupan jasmani. Pendidikan (agama) Islam hanya mengurus persoalan ritual dan spiritual, sementara kehidupan ekonomi, politik, seni-budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan sebagainya dianggap sebagai urusan duniawi yang menjadi bidang garap pendidikan non-agama. Pandangan dikotomis inilah yang menimbulkan dualisme dalam sistem pendidikan. Istilah pendidikan agama dan pendidikan nonagama, atau ilmu agama dan ilmu umum sebenarnya muncul dan pandangan dikotomis tersebut. Adanya perubahan dan penyempitan pengertian ulama menjadi fuqaha, sebagai orang-orang yang hanya mengerti soal-soal keagamaan belaka, sehingga tidak dimasukkan ke dalam barisan kaum intelektual, juga merupakan implikasi dan

pandangan dikotomis tersebut. Menurut Azra (1999) pemahaman semacam itu muncul ketika umat Islam Indonesia mengalami masa penjajahan yang sangat panjang, di mana umat Islam mengalami keterbelakangan dan disintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perbenturan umat Islam dengan pendidikan dan kemajuan Barat memunculkan kaum intelektual baru (cendekiawan sekuler), yang menurut Benda (dalam Sartono Kartodirjo, ed, 1981) sebagian besar kaum intelektual tersebut adalah hasil pendidikan Barat yang terlatih berpikir secara Barat. Dalam proses pendidikannya, mereka mengalami *brain washing* (cuci otak) dan hal-hal yang berbau Islam, sehingga mereka menjadi teralienasi (terasing) dan ajaran-ajaran Islam dan muslim sendiri. Bahkan terjadi gap (kesenjangan) antara kaum intelektual baru (sekuler) dengan intelektual lama (ulama), dan ulama dikonotasikan sebagai kaum sarungan yang hanya mengerti soal-soal keagamaan dan buta dalam masalah-masalah keduniaan. Pandangan dikotomis mempunyai implikasi terhadap pengembangan pendidikan agama Islam yang lebih berorientasi pada keakhiratan, sedangkan masalah dunia dianggap tidak penting, serta menekankan pada pendalaman *al-'ulm al-diniyah* (ilmu-ilmu keagamaan) yang merupakan jalan pintas untuk menuju kebahagiaan akhirat, sementara sains (ilmu pengetahuan) dianggap terpisah dan agama. Demikian pula pendekatan yang dipergunakan lebih bersifat keagamaan yang normatif, doktriner dan absolutis. Peserta didik diarahkan untuk menjadi pelaku (*actor*) yang loyal (setia), memiliki sikap *commitment* (keberpihakan), dan dedikasi (pengabdian) yang tinggi terhadap agama yang dipelajari. Sementara itu, kajian-kajian keilmuan yang bersifat empiris, rasional, analitis-kritis, dianggap dapat menggoyahkan iman, sehingga perlu ditindih

oleh pendekatan keagamaan yang normatif dan doktriner tersebut.

Model dikotomis tersebut pernah terwujud dalam realitas Sejarah pendidikan Islam. Pada periode pertengahan, lembaga pendidikan Islam (terutama madrasah sebagai pendidikan tinggi atau *al-Jami'ah*) tidak pernah menjadi universitas yang difungsikan semata-mata untuk mengembangkan tradisi penyelidikan bebas berdasarkan nalar. Ia banyak diabdikan kepada *al-'ulum al-diniyah* (ilmu-ilmu agama) dengan penekanan pada fiqih, tafsir, dan hadis. Sementara ilmu-ilmu nonagama (keduniaan), terutama ilmu-ilmu alam dan eksakta sebagai akar pengembangan sains dan teknologi, sejak awal perkembangan madrasah dan *al-Jami'ah* sudah berada dalam posisi marginal.

Islam tidak pernah membedakan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu umum (keduniaan), dan tidak berpandangan dikotomis mengenai ilmu pengetahuan. Namun demikian, dalam realitas sejarahnya justru supremasi lebih diberikan pada ilmu-ilmu agama (*al-'ulum al-diniyah*) sebagai jalan tol untuk menuju Tuhan.

Sebelum kehancuran teologi Mu'tazilah pada masa khalifah al-Ma'mun (198-218 H/813-833 M), mempelajari ilmu-ilmu umum (kajian-kajian nalar dan empiris) ada dalam kurikulum madrasah, tetapi dengan *pe-makruh-an* atau bahkan lebih ironis lagi "pengharaman" penggunaan nalar setelah runtuhnya Mu'tazilah, ilmu-ilmu umum yang dicurigai itu dihapuskan dan kurikulum madrasah. Mereka yang berminat mempelajari ilmu-ilmu umum dan yang mempunyai semangat *scientific inquiry* (penyelidikan ilmiah) guna membuktikan kebenaran ayat-ayat kauniyah, terpaksa harus belajar sendiri-sendiri atau di bawah tanah, karena dipandang sebagai ilmu-

ilmu subversif yang dapat menggugat kemapanan doktrin Sunni, terutama dalam kalam dan fiqih. Adanya *Madrasah at-Thib* (Sekolah Kedokteran) juga tidak dapat mengembangkan ilmu kedokteran dengan bebas, karena sering digugat Fuqaha', misalnya tidak diperkenankan menggunakan organ-organ mayat sekalipun dibedah untuk diselidiki. Demikian pula Rumah Sakit Riset di Bagdad dan Kairo, karena dibayangi legalisme fiqh yang kaku akhirnya harus berkonsentrasi pada ilmu kedokteran teoritis dan perawatan. Mengapa legalisme fiqih atau syariah dan ortodoksi agarna serta semangat intoleransi terhadap para Saintis begitu dominan dalam lembaga pendidikan Islam?

Menurut Azra (dalam Stanton, 1994), karena: *pertama*, pandangan tentang ketinggian syariah atau ilmu-ilmu keagamaan, sebagai jalan tol untuk menuju Tuhan; *kedua*, lembaga-lembaga pendidikan Islam secara institusional dikuasai oleh mereka yang ahli dalam bidang ilmu-ilmu keagamaan, sehingga kelompok Saintis (*Dar al-'ilm*) tidak mendapat dukungan secara institusional, justru Fuqaha' berhadapan dengan tantangan Saintis, sehingga kaum Saintis tidak berdaya menghadapi Fuqaha' yang mengklaim legitimasi religius sebagai *the guardian of God's given law* (pelindung/penguasa syariah); dan *ketiga*, hampir seluruh madrasah/al-Jami'ah didirikan dan dipertahankan dengan dana wakaf dan para dermawan dan penguasa politik muslim.

Motivasi kesalehan mendorong para dermawan untuk mengarahkan madrasah pada lapangan ilmu-ilmu agama yang lebih banyak mendatangkan pahala, sementara itu penguasa politik yang memprakarsai berdirinya madrasah. Bertolak dan kenyataan sejarah tersebut, maka kemunduran peradaban Islam serta keterbelakangan sains dan teknologi di

dunia Islam di samping karena faktor dan luar juga banyak dipengaruhi oleh faktor dan dalam din umat Islam sendiri, yang kurang peduli terhadap kebebasan penalaran intelektual dan kurang menghargai kajian rasional-empirik atau semangat pengembangan ilmiah dan filosofis. Dengan kata lain, model dikotomis dijadikan sebagai titik tolak dalam pengembangan pendidikan.

2. Model Mekanisme

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 1996), *mechanism* secara etimologis berarti: hal kerja mesin, cara kerja suatu organisasi, atau hal saling bekerja seperti mesin, kalau yang satu bergerak, maka yang lain turut bergerak. Model *mechanism* memandang kehidupan terdiri atas berbagai aspek, dan pendidikan dipandang sebagai penanaman dan pengembangan seperangkat nilai kehidupan, yang masing-masing bergerak dan berjalan menurut fungsinya, bagaikan sebuah mesin yang terdiri atas beberapa komponen atau elemen-elemen, yang masing-masing menjalankan fungsinya sendiri-sendiri, dan antara satu dengan lainnya bisa saling berkonsultasi atau tidak.

Aspek-aspek atau nilai-nilai kehidupan itu sendiri terdiri atas: nilai agama, nilai individu, nilai sosial, nilai politik, nilai ekonomi, nilai rasional, nilai estetis, nilai biofisik, dan lain-lain. Dengan demikian, aspek atau nilai agama merupakan salah satu aspek atau nilai kehidupan dan aspek-aspek atau nilai-nilai kehidupan lainnya. Hubungan antara nilai agama dengan nilai-nilai lainnya dapat bersifat *horizontal-lateral (independent)* atau *lateral-sekuensial*, atau *vertikal linier*. Relasi yang bersifat *horizontal-lateral (independent)*, mengandung arti bahwa beberapa mata pelajaran (mata kuliah) yang ada dan pendidikan agama mempunyai hubungan sederajat yang

independen, dan tidak saling berkonsultasi. Relasi yang bersifat *lateral-sekuensial*, berarti di antara masing-masing mata pelajaran (mata kuliah) tersebut mempunyai relasi sederajat yang bisa saling berkonsultasi. Sedangkan relasi *vertikal-linier* berarti mendudukkan pendidikan agama sebagai sumber nilai atau sumber konsultasi, sementara seperangkat mata pelajaran (mata kuliah) yang lain adalah termasuk pengembangan nilai-nilai insani yang mempunyai relasi vertikal-linier dengan agama.

Umat Islam dididik dengan seperangkat ilmu pengetahuan atau mata pelajaran, salah satunya adalah mata pelajaran pendidikan agama yang mempunyai fungsi tersendiri, yaitu sebagai: *pertama*, pengembangan dan peningkatan keimanan dan ketakwaan; *kedua*, penyaluran bakat dan minat dalam mendalami agama; *ketiga*, perbaikan kesalahan, kekurangan dan kesalahan dalam keyakinan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama; *keempat*, pencegahan hal-hal negatif dan lingkungannya atau budaya asing yang berbahaya; *kelima*, sumber nilai atau pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan dunia-akhirat; dan *keenam*, pengajaran atau penyampaian pengetahuan keagamaan (Muhaimin dkk., 1996). Jadi, pendidikan agama lebih menonjolkan fungsi moral dan spiritual atau dimensi afektif daripada kognitif dan psikomotor dalam arti dimensi kognitif dan psikomotor diarahkan untuk pembinaan afektif (moral dan spiritual) yang berbeda dengan mata pelajaran lainnya.

Model tersebut tampak dikembangkan pada sekolah atau Perguruan Tinggi (PT) yang bukan berciri khas agama islam. Di dalamnya diberikan seperangkat mata pelajaran atau ilmu pengetahuan (mata kuliah), salah satunya adalah mata pelajaran atau mata kuliah pendidikan agama yang hanya

diberikan dua jam pelajaran per minggu atau di perguruan tinggi tiga sks, dan didudukkan sebagai mata kuliah dasar umum, yakni sebagai upaya pembentukan kepribadian yang religius. Secara ideal, kebijakan tersebut sangat prospektif dalam membangun watak, moral dan peradaban bangsa yang bermartabat, tetapi dalam realitasnya pendidikan agama Islam sering termarginalkan, bahkan dosen PAI pada perguruan tinggi umum pun kadang-kadang terhambat kariernya untuk menggapai jabatan fungsional tertinggi (guru besar), karena tidak tersedia program studi atau fakultas sebagai induknya. Sebagai implikasinya, pengembangan pendidikan agama Islam tergantung pada kemauan, kemampuan, atau *political-will* dan para pembinaanya dan sekaligus pimpinan dan lembaga pendidikan tersebut, terutama dalam membangun hubungan kerja sama dengan mata pelajaran (kuliah) lainnya.

Fenomena pengembangan pendidikan agama Islam di Sekolah atau perguruan tinggi umum tampaknya sangat bervariasi. Dalam arti ada yang cukup puas dengan pola *horizontal-lateral (independent)*, ada yang mengembangkan pola relasi *lateralsekuensial*, dan ada pula yang berobsesi untuk mengembangkan pola relasi *vertikal-linier*. Semuanya itu lagi-lagi banyak ditentukan oleh kemauan, kemampuan, dan *political-will* dan pimpinan dan lembaga pendidikan tersebut. Kebijakan tentang pembinaan pendidikan agama Islam secara terpadu di sekolah umum misalnya, antara lain menghendaki agar pendidikan agama dan sekaligus para guru/dosen agamanya mampu memadukan antara mata pelajaran agama dengan pelajaran umum. Kebijakan ini akan sulit diimplementasikan pada sekolah atau perguruan tinggi umum yang cukup puas hanya mengembangkan pola relasi *horizontal-lateral (independent)*. Barangkali kebijakan tersebut relatif mudah

diimplementasikan pada lembaga pendidikan yang mengembangkan pola lateral-sekuensial. Hanya saja implikasi dan kebijakan tersebut adalah para guru/dosen agama harus menguasai ilmu agama dan memahami substansi ilmu-ilmu umum, sebaliknya guru/dosen umum dituntut untuk menguasai ilmu umum (bidang keahliannya) dan memahami dasar-dasar ajaran dan nilai-nilai agama. Bahkan guru/dosen agama dituntut untuk mampu menyusun buku-buku teks keagamaan yang dapat menjelaskan hubungan antara keduanya.

Namun demikian, kadang-kadang dirasakan adanya kesulitan, terutama ketika berhadapan dengan dasar pemikiran yang berbeda, sehingga terjadi konflik antara keduanya. Contoh sederhana adalah menyangkut asal usul manusia. Sains yang diajarkan di sekolah bertolak dan dasar pemikiran bahwa manusia berasal dari kera, sementara pendidikan agama tidak demikian. Psikologi behavioristik bertolak dan hasil penelitian terhadap sejumlah hewan untuk diterapkan kepada manusia, sementara pendidikan agama dan hasil pemahaman terhadap wahyu (kitab suci). Ilmu ekonomi bertolak dan pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang serakah (kapitalisme), sehingga bagaimana seseorang yang memiliki modal sedikit, tetapi mampu menghasilkan keuntungan yang lebih besar, yang berbeda halnya dengan pendidikan agama, demikian seterusnya.

Suasana tersebut kadang-kadang menimbulkan ketegangan pada diri peserta didik, terutama jika keduanya (baik pendidikan agama maupun nonagama) saling memaksakan kebenaran pandangan mereka. Agama bertolak dan keimanan, sedangkan ilmu pengetahuan bertolak dan keraguan. Dan sini peserta didik tampaknya diuji

pandangannya. Ketika pandangan agama mendominasi pemikirannya, kadang-kadang ada kecenderungan untuk bersikap pasif dan statis atau fatalistik, sedangkan bila ilmu pengetahuan mendominasi pemikirannya, maka ada kecenderungan untuk bersikap *split of personcility*. Jang-jangan munculnya budaya NKK (Nepotisme, Korupsi, dan Kolusi) antara lain sebagai akibat dan pengembangan pendidikan agama Islam yang menggunakan model *mechanism* tersebut, terutama yang menerapkan pola relasi *horizontal-lateral (independent)* dan *lateral-sekuensial*.

3. Model Organism/Sistemik

Meminjam istilah Biologi, "*organism*" dapat berarti susunan yang bersistem dan berbagai bagian jasad hidup untuk suatu tujuan (Depdikbud, 1996). Dalam konteks pendidikan Islam, model *organism* bertolak dan pandangan bahwa aktivitas kependidikan merupakan suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang hidup bersama dan bekerja sama secara terpadu menuju tujuan tertentu, yaitu terwujudnya hidup yang religius atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai agama.

Pandangan semacam itu menggarisbawahi pentingnya kerangka pemikiran yang dibangun dan *fundamental doctrines* dan *fundamental values* yang tertuang dan terkandung dalam Al-Qur'an dan *al-sunnah ash-shahihah* sebagai sumber pokok. Ajaran dan nilai-nilai Ilahi/agama/wahyu didudukkan sebagai sumber konsultasi yang bijak, sementara aspek-aspek kehidupan lainnya didudukkan sebagai nilai-nilai insani yang mempunyai hubungan vertical linier dengan nilai Ilahi/agama.

Melalui upaya semacam itu, maka sistem pendidikan Islam diharapkan dapat mengintegrasikan nilai-nilai ilmu pengetahuan, nilai-nilai agama dan etik, serta mampu

melahirkan manusia-manusia yang menguasai dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, memiliki kematangan profesional, dan sekaligus hidup di dalam nilai-nilai agama. Paradigma tersebut tampaknya mulai dirintis dan dikembangkan dalam sistem pendidikan di madrasah, yang dideklarasikan sebagai sekolah umum yang berciri khas agama Islam, atau sekolah-sekolah (swasta) Islam unggulan. Kebijakan pengembangan madrasah berusaha mengakomodasikan tiga kepentingan utama, yaitu: *pertama*, sebagai wahana untuk membina rob atau praktik hidup keislaman; *kedua*, memperjelas dan memperkuat keberadaan madrasah sederajat dengan sistem sekolah, sebagai wahana pembinaan warga negara yang cerdas, berpengetahuan, berkepribadian, serta produktif; dan *ketiga*, mampu merespons tuntutan-tuntutan masa depan, dalam arti sanggup melahirkan manusia yang memiliki kesiapan memasuki era glóbalisasi, industrialisasi maupun era informasi (Fadjar,1998).

Bagaimana dengan PAI di Perguruan Tinggi Umum? Menurut Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor: 38/DIKTI/Kep/2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, bahwa Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan salah satu mata kuliah kelompok pengembangan kepribadian (MPK). Visi mata kuliah ini menjadi sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan peserta didik untuk mengembangkan kepribadiannya. Sedangkan misinya adalah membantu peserta didik agar mampu mewujudkan nilai dasar agama dalam menerapkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang dikuasainya dengan rasa tanggung jawab kemanusiaan (Pasal 1 & 2). SK Dirjen tersebut diperbarui dengan ditetapkannya Keputusan Dirjen Dikti

Depdiknas Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah pengembangan Kepribadian (MPK) di Perguruan Tinggi. Di dalamnya dinyatakan bahwa:

Visi kelompok MPK di perguruan tinggi merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan peserta didik memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya.

Misi kelompok MPK di perguruan tinggi membantu peserta didik memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dimilikinya dengan rasa tanggung jawab.

Pendidikan agama merupakan salah satu kelompok MPK, yang kompetensi dasarnya dirumuskan sebagai berikut: *"Menjadi ilmuwan dan profesional yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kehidupan."*

Dilihat dari visi, misi, dan kompetensi dasar pendidikan agama (sebagai bagian dari MPK) di PTU tersebut, maka idealnya PAI di PTU dikembangkan ke model organisme atau sistemik, yang menjadikan PAI sebagai sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggaraan program studi serta membantu peserta didik (calon sarjana) agar mampu mewujudkan nilai dasar agama dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Bagaimana realitasnya di lapangan? Fenomena yang ada menunjukkan bahwa pada umumnya PAI di PTU

dilaksanakan dengan menggunakan model dikotomis atau mekanisme, meskipun ada beberapa PTU yang menggunakan model organisme/sistemik. Hal ini setidaknya tidaknya dapat diamati dan pelaksanaan pendidikan di PTU yang mana nilai-nilai agama belum mampu mewarnai pengembangan program studi-program studi yang ada, dan belum mampu mewujudkan nilai dasar agama dalam menerapkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni.

Menurut Tilaar (1998), bahwa penelitian, pemikiran, dan gagasan-gagasan dan para ahli yang terpisah-pisah (*horizontallateral/independent*) atau tidak bertolak dan paradigma organisme/sistemik tersebut, dapat berbahaya dalam eksistensi kehidupan manusia. Hal ini dapat dilihat dan bahaya praktik bio-teknologi dengan adanya praktik kloning terhadap binatang yang dewasa ini mulai dilaksanakan juga terhadap manusia. Meskipun pemerintah Amerika Serikat misalnya telah melarang teknologi kloning terhadap manusia, tetapi hal ini telah merupakan indikasi perlunya seseorang berhati-hati di dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang terlepas dan nilai-nilai agama. Karena itu, PTU masa depan perlu dikembangkan ke arah integrasi nilai-nilai ilmu pengetahuan, nilai-nilai agama dan etik yang merupakan karakteristik dan masyarakat madani di era global.

Uraian tersebut di atas menggarisbawahi perlunya upaya spiritualisasi pendidikan atau berupaya menginternalisasi nilai-nilai atau spirit agama melalui proses pendidikan ke dalam seluruh aspek pendidikan di sekolah-sekolah atau perguruan Tinggi Umum. Hal ini dimaksudkan untuk memadukan nilai-nilai sains dan teknologi serta seni dengan keyakinan dan kesalehan dalam diri peserta didik. Ketika belajar Biologi misalnya, maka pada waktu yang sama

diharapkan pelajaran itu dapat meningkatkan keyakinannya kepada Allah karena di dalam ajaran agama diterangkan bahwa Tuhanlah yang telah menciptakan keanekaragaman (*biodiversity*) di muka bumi ini dan semuanya tunduk pada hukum-Nya.

4. Model Pendidikan yang Integratif

Untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang sudah kita alami maka yang pertama harus dilakukan adalah mengikis habis warisan sejarah yang tidak sesuai dengan gagasan yang dibawa al-Qur'an Pendidikan Islam kita harus terjauhi dan buaian *hellenisme* yang diberi jubah Islam dan kita harus kembali kepada sumber Islam, al-Qur'an dan karir yang diraih Muhammad utusan Allah. Menurut hemat penulis, hal ini sangat mungkin dilakukan dan dipastikan akan mampu bertahan lama dan tidak perlu menimbulkan kontroversi dan dualisme antagonistis seperti yang pernah timbul pada zaman klasik dan apa yang kita alami sekarang. Untuk itu, nanti kita tidak perlu berteriak, "marilah kita Islamkan ilmu modern", yang hanya akan mengulang hal serupa, yaitu pendidikan Barat yang dijustifikasi dengan ayat-ayat al-Qur'an.

Dalam kaitan dengan hal tersebut, maka yang pertama sekali harus kita miliki adalah kemandirian dalam segala aspek. Hal ini akan melindungi kita dari berbagai intervensi yang akan memperkosa kita untuk bersiteguh berdiri pada konsep yang murni dari al-Qur'an untuk memberdayakan bangsa yang mayoritas Muslim ini.

Setelah itu, adalah menghilangkan kekhawatiran bahwa kelak pendidikan Islam dihapus. Menurut hemat penulis, itu tidak mungkin dan bukan hanya karena jumlah Islam yang besar, bahkan terbesar yang terhimpun dalam satu negara, tetapi juga karena adanya keterhatasan pemerintah dalam

menyelenggarakan pendidikan. Pemerintah tetap mengharapkan adanya partisipasi masyarakat dalam hal tersebut, dan kesempatan ini kita isi secara maksimal. Di samping tentu saja bahwa "Ketuhanan Yang Maha Esa" bagi umat Islam adalah makna ketauhidan, dan karenanya kita berkesempatan menghadirkan dan mengelola pendidikan Islam di negeri ini selama konsep itu masih ada. Sedangkan kemunduran pendidikan Islam, itu sangat mungkin, dan bahkan sekarang saja cenderung menjadi pendidikan "kelas dua", dan akan semakin tergusur apabila tidak segera dibenahi.

Untuk itu, maka tawaran penulis adalah kita harus segera menuju ke arah integrasi dengan sekaligus menciptakan perangkat lunaknya filosofi yang jelas dan baku, yang hingga kini belum mampu wujudkan. Integrasi yang harus dituju bukan hanya secara kelembagaan saja, tetapi mencakup segala aspek nafas penyelenggaraan pendidikan. Kita belum memiliki contoh yang solid terhadap model pendidikan yang demikian, termasuk UIN yang baru merupakan pendidikan satu atap atau belum mencapai tingkat integrasi.

Untuk mempersiapkan hal tersebut, maka yang terlebih dahulu harus bersedia adalah sumberdaya manusia yang jelas kemampuannya dan tidak hanya sekadar untuk mencari penghidupan dalam pelaksanaan tugasnya. Mereka bukan pula yang hanya beragama Islam, tetapi tahu isi Islam, sehingga proses integrasi pendidikan dapat berjalan dengan sendirinya, karena ia tahu ayat-ayat *geografiah*, *sosio1ogiyah*, *syari'ah*, *tarbiyah* dan sebagainya. Di bagian lain, juga terjauhkan dan pengaruh ajaran yang hanya berjubah Islam seperti *hellenisme* atau generasi baru dan wilayah lainnya, yang melepaskan *the core of Islam*, al-Qur'an dan prestasi pendidikan yang

diterapkan Nabi Muhammad SAW. Sebagai resiko ber-Pancasila dan arab perubahan masa depan, maka integrasi pendidikan juga harus bermuara pada wujud pendidikan bangsa dan menghindarkan diri dari institusi dan pendek yang eksklusif. Untuk masa datang, bentuk eksklusifisme tidak akan menguntungkan lagi atau bahkan justru menjadi hambatan dalam mencapai kemajuannya.

Melalui pendidikan yang integratif inilah kita mengharapkan lahirnya umat yang bermoral, saling tolong menolong (yang kuat membantu yang lemah dan tidak saling menekan demi keuntungan dan kekayaan sendiri) sehingga proses pemberdayaan berlangsung dengan terencana, baik, tanpa henti dan dapat menyesuaikan din dengan zamannya. Dalam lingkup bangsa juga demikian adanya bahwa *ukhuwah basyariyah* dapat berkembang lebih bersahaja, sehingga kelak tidak menimbulkan kerawanan-kerawanan, karena eksklusifitas komunitas tertentu, yang besar merasa menang dan menekan, dan yang kecil merasa terjepit hingga perlu melawan.

C. Penutup

Berbagai krisis multidimensional yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia memang tidak bisa hanya dilihat dan di atasi melalui pendekatan *mono-dimensional*. Namun demikian, karena segala krisis tersebut berpangkal dan krisis akhlak atau moral, maka pendidikan agama dipandang memiliki peranan yang sangat vital dalam membangun watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Untuk itu, diperlukan pengembangan pendidikan agama yang lebih kondusif dan prospektif terutama di sekolah atau perguruan tinggi. Model pengembangannya perlu direkonstruksi, dan model yang

bersifat dikotomik dan mekanisme ke arah model organisme atau sistemik, model Pendidikan yang integral. Hanya saja untuk merombak model tersebut diperlukan kemampuan dan *political will* dan para pengambil kebijakan, termasuk di dalamnya para pimpinan lembaga pendidikan itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Ash-Shan'ani, al-Sayyid al-Imam Muhammad bin Ismail al Kahlani, (t.t), *Subulus Salam Juz III*. Bandung: Dahlan.
- Azra, Azyumardi. 1999. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*. Jakarta: Logos.
- , 2003. "Agama dan Pemberantasan Korupsi". Kompas September 2003.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Penerangan RI. 1961. *Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi*. Jakarta: Dep. Penerangan RI.
- Fadjar, A. Malik. 1998. *Madrasah dan Tantangan Modernitas*. Bandung: Mizan.
- , 2003. *Strategi Pengembangan Pendidikan Islam Dalam Era Globalisasi*. Makalah Disampaikan sebagai Keynote Address dalam Seminar on Islam and The Challenges of Global Education in the New Millenium, The HUM Alumni Chapter of Indonesia di Pekanbaru, tanggal 26 Januari 2003.
- Ibnu Miskawaih, Ahmad ibn Muhammad ibn Ya'qub, Tahzth al-A khlaq. Beirut: Mansyurat Dar al-Maktabah al-Hayah, 1398 H.
- Isu-Isu Pokok Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2001. [strukorg/bagron/ isu%20isu%20 Pokok. htm](http://strukorg/bagron/isu%20isu%20Pokok.htm).

- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
- Keputusan Dirjen Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor 38/Dikti/Kep/2002, Tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.
- Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006 Tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok MPK di Perguruan Tinggi.
- <http://www.ncert.nic.in/ncert/journal/journalnew/vechap4.htm>
- Muhaimin, et. al. 1996. *Strategi Belajar Mengajar Penerapannya Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama*. Surabaya: Citra Media.
- . 2001. *Tema-tema Pokok Dakwah Islam di Tengah Transformasi Sosial*. Surabaya: Karya Abditama.
- . 2002. *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama di Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. II.
- . 2003. *Madrasah Menatap Peradaban Global. Makalah Disajikan Pada Seminar di Madrasah Aliyah Negeri Sidoarjo, Sabtu 8 Maret 2003*.
- . 2003. *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam Pemberdayaan, Pengembangan Kurikulum Hingga Redefinisi Islamisasi Pengetahuan* Bandung: Nuansa.
- Tihaar, H.A.R. 1998. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional*. Magelang: Tera Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.